



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1233>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at : <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
DALAM MEWUJUDKAN DESA TANGGUH BENCANA
(STUDI PADA DESA LOA IPUH DAN DESA PURWAJAWA
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA)**

Arwanto Harimas Ginting¹

Tri Dewi²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 40622, Indonesia

²Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Aji Pangeran Mangkunegara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75511

Corresponding author: aaarwanto@gmail.com

Received: 18 Januari 2020, Accepted: 26 Maret 2020; Published Online: 30 Maret 2020

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi BPBD Kabupaten Kutai Kertanegara dalam upaya mitigasi kebencanaan guna mendukung masyarakat yang mandiri sehingga nantinya program kinerja tersebut dapat berkelanjutan. Disamping itu, juga untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana, apakah masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dengan adanya Destana tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus, dimana peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan secara langsung sementara data sekunder tidak secara langsung diperoleh di lapangan, melalui observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat beberapa strategi BPBD Kabupaten Kutai Kertanegara dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat antara lain sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara bertahap, pengembangan Destana melibatkan komunitas. Selain itu, partisipasi masyarakat termasuk tinggi walau terhalang dengan profesi masyarakat. Keterlibatan masyarakat di tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat akan daerahnya yang rawan bencana sehingga kesadaran telah membuka pikiran mereka untuk berpartisipasi dan ikut dalam program desa tangguh bencana.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan dan Desa Tangguh Bencana.



ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the strategy of BPBD Kutai Kertanegara Regency in disaster mitigation efforts to support an independent society so that later the performance program can be sustainable. In addition, it is also to determine the level of community participation in disaster mitigation efforts, whether the community can participate optimally with the existence of Destana. The method used is descriptive qualitative case study, where the researcher uses two data sources, namely primary and secondary. Primary data is obtained directly from the field while secondary data is not obtained directly in the field, through observation and documentation. The results of this study are that there are several strategies of BPBD Kutai Kertanegara Regency in maximizing community participation, including socialization and training carried out in stages, Destana development involving the community. In addition, community participation is high even though it is hindered by community professions. Community involvement in these areas cannot be separated from people's awareness of their disaster-prone areas so that awareness has opened their minds to participate and participate in disaster resilient village programs.

Keywords: *Strategy, Empowerment and Resilient Village Disaster*

PENDAHULUAN

Bencana banyak memberikan dampak dan kerugian pada hasil-hasil pembangunan suatu daerah. Pemulihan pasca bencana dan tanggap darurat membutuhkan juga dana/anggaran yang tidak sedikit. Dana/anggaran tersebut semestinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pemberantasan kemiskinan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat lainnya. Walaupun penelitian Zein dkk (2014) di Sumatera Barat berpendapat bahwa bencana alam di suatu wilayah justru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan teori *Creative Destruction* yang dikemukakan oleh Schumpeter bahwa bencana alam justru dapat menjadi

katalis bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pascabencana alam. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Maarif, 2011).

Untuk itu perlu mewujudkan desa tangguh bencana yang memiliki kapabilitas dalam manajemen bencana, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan yang memadai. (Buchari 2017). Tidak hanya itu Rina Suryani oktari (2019) mengemukakan bahwa perlu

keterlibatan multistakeholder dalam mendukung terwujudnya Desa Tangguh Bencana. Program desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana yang berbasis pada masyarakat.

Menurut Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012. Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, melalui : 1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya. 2) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana 4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan Peraturan BNPB No. 1/2012,

Desa/Kelurahan Tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Dalam penelitian Aini dkk (2017) faktor penghambat efektifitas desa tangguh bencana berupa belum ada masyarakat yang secara pendidikan memiliki spesialisasi dalam hal kebencanaan, misal ahli kebencanaan, belum adanya kerjasama dengan pihak-pihak diluar desa secara keberlanjutan seperti LSM, CSR dan perguruan tinggi yang memang fokus pada kajiankajian pengurangan risiko/penanggulangan bencana. Mengingat Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah dalam salah satu daerah dengan kerawanan bencana berkategori tinggi dengan skor kerawanan adalah 65 dari ranking indeks 175 secara nasional. (<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/441.pdf>).

Kalimantan Timur merupakan provinsi kedua terluas di Indonesia setelah Papua dengan luas wilayah kurang lebih 245.237,80 km² atau sekitar satu setengah

kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia dengan kepadatan penduduk mencapai 15 jiwa per km persegi. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur dengan wilayah yang memiliki potensi industri pertambangan

yang cukup besar terutama batubara dan migas. Beberapa sungai yang ada diwilayah ini adalah Sungai Mahakam, Gunung Batuayan, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyuir, Sungai Sesayap, Sungai Telen, dan Sungai Wahan. Ancaman Bencana Banjir, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Tabel 1.

Jumlah Kejadian dan Korban Bencana Alam Menurut Jenisnya Tahun 2015

Jenis Bencana Alam/ Natural Disaster Type	Frekuensi Frequency	Korban/Victims				Perkiraan Kerugian /Estimate Losses (Rp 0)
		Mati Death	Penduduk/ Population Menderita Injured	Bangunan/Building Hancur Destroyed	Rusak Damage	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Angin Topan/ Cyclone	5	-	2	-	10	25 000
2. Banjir/ <i>Flood</i>	25	5	12 371	-	1537	768 500
3. Kebakaran/ <i>Fire</i>	45	-	2 365	515	-	25 750 000
4. Tanah Longsor/ <i>Landslide</i>	19	-	118	-	29	14 500
5. Gempa Bumi/ <i>Earthquake</i>	1	-	5	-	10	12 000
6. Tanah Retak/ <i>Crack Land</i>	-	-	-	-	-	-
7. Gunung Meletus/ <i>Volcanic Eruption</i>	-	-	-	-	-	-
8. Kekeringan/ <i>Drought</i>	-	-	-	-	-	-
9. Perahu Karam <i>/Ship Wreck</i>	16	7	20	-	-	-
10. Hama Tanaman <i>/Plant Disease</i>	-	-	-	-	-	-
11. Kekurangan Pangan/ <i>Food Shortages</i>	-	-	-	-	-	-
12. Gagal Panen / <i>Crop Failure</i>	-	-	-	-	-	-
13. Polusi Gas Beracun/ <i>Gas Pollution</i>	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2015	111	12	14 881	515	1 586	26 570 000
<i>Total</i> 2014	83	5	14 684	551	2 455	-
2013	252	32	31 164	1 006	169	-
2012	23	-	10 658	1 240	16	30 900
2011	255	-	-	-	-	6 675

Sumber: <https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/18/336/banyaknya-kejadian-dan-korban-bencana-alam-menurut-jenisnya-2015.html>

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perlu pemberdayaan masyarakat melalui desa tangguh bencana untuk membantu pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi bencana dan pasca bencana.

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian alamiah (Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (Bungin, 2010). Jenis dan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam kegiatan magang ini dilakukan dengan cara wawancara semiterstruktur dengan informan yang merupakan sumber data dari penelitian ini, observasi dan penulisan dokumentasi. Untuk menganalisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data

(*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). (Miles & Huberman)

KAJIAN TEORI

Ginandjar Kartasasmitha (1996;145) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim (2012; 33-34) bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah:

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan

dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian. Secara keseluruhan bahwa

menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi ke dalam 18 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 237 desa/ kelurahan dengan topografi sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 7 – 25 Mdpl terdapat di beberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, kelerengan/kemiringan lahan sebagian besar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kelerengan antara 15-40% dengan luas total sebesar 816.367 Km², fisiografi dikelompokkan menjadi 9 satuan fisiografi, yaitu daerah rawa pasang surut, dataran alluvial, daerah jalur kelokan sungai, daerah rawa, daerah lembah alluvial, daerah teras, daerah dataran, daerah perbukitan, dan daerah pegunungan, klimatologi dipengaruhi oleh

letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26⁰C, perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5⁰– 7⁰C dengan jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 –2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau ke arah barat, potensi hidrologi cukup besar dengan jumlah 31 sungai besar dan kecil, dari sungai-sungai tersebut yang tersebar dan terpanjang adalah Sungai Mahakam sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional dengan DAS meliputi DAS Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, dan DAS Semoi. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat, jenis tanah pada umumnya tergolong ke dalam tanah yang bereaksi asam.

Penggunaan lahan diklasifikasikan ke dalam kawasan lindung dan budi daya. Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari Hutan Lindung, Cagar Alam Sedulang di Kecamatan Muara Kaman, Taman Nasional Kutai di Kecamatan Muara Kaman; dan Taman Hutan Raya Bukit

Suharto. Kondisi demografis/penduduk Kutai Kartanegara tahun 2017 berjumlah sebanyak 752.091 jiwa dengan rincian 394.876 jiwa penduduk laki-laki dan 357.215 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2017 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (16,13%), Kecamatan Tenggarong Seberang (10,01%), Kecamatan Loa Janan (8,68%) dan di Kecamatan Samboja (8,86%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara untuk uraian tugas pejabat strukturalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengelompokan tugas secara umum

dibagi pada saat Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 324 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor/THL. Namun yang telah mengikuti diklat SAR MFR Dan Water Rescue (25 orang), Jungle Rescue (25 orang), HART Dan MFR (20 orang), Scuba Diving And Sea Survival (20 orang), Water Rescue Lanjutan (20 orang), Personil DAMKAR Tingkat Dasar (33 orang), Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan (12 orang), dan Basic Water Rescue (25 orang).

Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh BPBD Kutai Kertanegara

Berdasarkan hasil observasi dengan melihat landasan hukum yang berlaku bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabat oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melimpahkan kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang setingkat dengan eselon III/a. Urusan

pemerintahan di bidang kebencanaan, yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan kebencanaan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan ini merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tercantum dalam Pasal 12 yang berbunyi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan bencana merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari Sub-Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub-Bencana dan Sub-Kebakaran. Berlakunya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang terintegrasinya penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah, yang rencananya diperkuat dengan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran.

Pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pasal tersebut wajib memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat termasuk perlindungan

terhadap kebencanaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dalam mengatasi masalah kebencanaan. Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah “Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan”. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan desa atau kelurahan, yang memiliki kemampuan dalam mengenali bentuk ancaman di wilayahnya dan mampu dalam mengenali bentuk ancaman di wilayahnya, dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan demi meminimalisir risiko bencana.

Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi, kegiatan-kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas untuk

pemulihan pasca keadaan darurat. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi masalah kebencanaan ini, dapat dilakukan dengan salah satu program dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dilimpahkan kepada daerah untuk melaksanakan program tersebut, yaitu yang salah satunya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah Program Desa Tangguh Bencana, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan di kelurahan dan desa.

Pelaksanaan program tersebut didukung dengan relawan yang berada di lingkungan sekitar desa/kelurahan dengan relawan berjumlah 47 orang. Relawan tersebut berada dibawah bimbingan seorang fasilitator di desa dan kelurahan tangguh bencana tersebut, yang diangkat melalui surat keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Relawan dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Kelurahan Loa Ipuh Darat diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Lurah Loa Ipuh Darat Nomor 002 Tahun 2018 dan Relawan Desa Purwajaya Tahun 2015 diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Purwajaya Nomor 360/58/PWA/XII/2015.

Tugas para relawan berbeda-beda diantaranya bagi relawan laki-laki membantu masyarakat dalam hal mobilisasi, ataupun hal-hal yang berkaitan di lapangan saat terjadinya bencana, sedangkan relawan perempuan membantu di dapur umum. Relawan tersebut diberikan tugas untuk bagiannya masing-masing yang diperbantukan pada masyarakat apabila terjadinya suatu bencana dan diharapkan untuk mampu menjadi agen penggerak dikalangan masyarakat. Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana, maka diharapkan para relawan ini mampu turun kelapangan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana sehingga meminimalisir timbulnya korban jiwa dan hilangnya harta benda.

Jumlah relawan tersebut dinilai sudah cukup mampu mengatasi membantu pergerakan dan mobilisasi masyarakat jika terjadi bencana dan mampu meminimalisir dampak yang timbul akibat bencana. Adanya program Desa Tangguh

Bencana ini memiliki nilai positif yang cukup besar baik bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, pada umumnya dan masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya khususnya maupun pemerintah kelurahan sendiri. Masyarakat menjadi tahu dan memahami konsep penanggulangan bencana dengan baik dan mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana di wilayah kelurahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Program Desa Tangguh Bencana ini dimaksudkan agar masyarakat mampu memanfaatkan semua potensi sumber daya yang ada, agar menjadi tangguh terhadap bencana dan mampu memiliki kemampuan kemandirian dalam beradaptasi dan menanggulangi bencana, sehingga risiko kematian, harta benda dan lain-lain dapat diminimalisir serta dapat dihindari. Berdasarkan isi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kegiatan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, tercantum di dalam pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa/kelurahan sasaran. Pengkajian risiko tersebut antara lain yaitu menilai ancaman, menilai kerentanan, menilai kapasitas, dan menganalisis risiko bencana.

Desa Tangguh Bencana hadir sebagai solusi dari fenomena alam yang terjadi. Desa Tangguh Bencana merupakan program nasional yang sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana, sebagai upaya mewujudkan Indonesia Tangguh. Diketahui latar belakang adanya pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara karena daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana juga karena adanya banyak masyarakat sekitar yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung akan merespon bencana di sekitarnya.

Sebelum adanya Program Desa Tangguh Bencana masyarakat belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menanggulangi bencana apabila terjadi bencana, sehingga banyaknya dampak yang tidak bisa diminimalisir yang menyebabkan banyaknya kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di kawasan bencana tersebut. Masyarakat perlu dibekali agar menjadi tangguh dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan teori perlu melakukan penyadaran sebelum berpartisipasi dalam

seluruh kejadian bencana dalam bentuk ajakan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan orang lain yang ada di sekitarnya. Dari hasil wawancara terhadap masyarakat atas program desa tangguh bencana disambut positif karena program tersebut mampu memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan juga memberikan efek positif kepada masyarakat dalam mengenali potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri untuk mengatasi masalah kebencanaan yang ada serta mengerti bagaimana tata cara melakukan penanganan bencana jika sewaktu-waktu bencana itu muncul. Masyarakat mulai sadar akan kewajiban menjaga lingkungan dan siap sedia bila terjadi bencana. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkapkan menginformasikan program destana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan cara masyarakat sebagai pelaku utama, masyarakat terlibat secara langsung dalam program tersebut.

Untuk itu masyarakat harus mentransformasi diri dengan peningkatan

kemampuan masyarakat yang dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan yang diberikan dari petugas operasional yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang pemadaman kebakaran dan bencana yang diikuti oleh 180 orang petugas operasional. Kegiatan ini yang kemudian diturunkan kepada masyarakat melalui pelatihan yang diberikan melalui program Desa Tangguh Bencana dengan harapan, masyarakat mampu untuk mandiri dalam menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya sebanyak dua kali setiap bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi program Desa Tangguh Bencana pada tahun 2016 berjalan intens setiap bulan namun pada tahun 2017 pelaksanaan sedikit terhambat karena dana.

Peraturan Lurah Loa Ipuh Darat Nomor 003 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas Kelurahan Loa Ipuh Darat pada pasal (6-7) yang berisi

sebagai berikut: Penyelamatan dan evakuasi korban dengan dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui upaya: Pencarian dan penyelamatan korban, Pertolongan darurat; dan atau Evakuasi Korban. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan: Kebutuhan air bersih dan sanitasi, Sandang, Pangan, Pelayanan kesehatan, Pelayanan social dan psikologis, Penampungan/tempat hunian. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, lintas instansi dan lintas sektoral, juga menjalin komunikasi dengan tokoh setempat. Karena, untuk menciptakan kondisi yang kondusif tersebut tidak hanya merupakan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah / pemerintah tetapi juga memerlukan peran dari instansi lain yang memiliki fungsi tugas yang sama. Masyarakat diberikan pemahaman tentang bencana yang ada, diurus dan diberikan kebutuhan yang cukup, agar kondisi bencana tersebut dapat kondusif.

Program Desa Tangguh Bencana menawarkan upaya peningkatan kemampuan yang diperlukan warga untuk dapat mengelola risiko akibat bencana alam atau teknologi yang dapat mengganggu keselamatan hidup dan penghidupan masyarakat desa.

Peningkatan kemampuan masyarakat ini mencakup perihal: Pengetahuan tentang kondisi desa secara lebih baik, Perkiraan/perhitungan potensi resiko bencana berdasarkan kajian yang melibatkan warga, Penyusunan rencana tindakan mencegah, menangkal dan meredam potensi ancaman, Keterampilan teknis bagi relawan dan perangkat desa, dan Penguatan koordinasi, kerjasama dan simpul-simpul sosial antara kelompok masyarakat untuk menemukan pilihan-pilihan cara penyelesaian masalah yang ada antara masyarakat desa sasaran secara mandiri.

Program Desa Tangguh Bencana sendiri merupakan rangkaian kegiatan berupa lokakarya mengenali lebih baik desanya sendiri, mengembangkan kajian risiko, menyusun rencana-rencana tindakan untuk mengurangi bencana, dan latihan peningkatan keterampilan-keterampilan teknis tertentu. Sumberdaya pendukung pelaksanaannya dapat berasal dari inisiatif masyarakat, Alokasi Dana Desa, APBD, APBN, Lembaga non pemerintah, lembaga asing atau swasta.

Kegiatan Desa Tangguh Bencana diselenggarakan dalam bentuk pemaparan dan diskusi tentang program Desa Tangguh Bencana, dihadiri oleh

perwakilan SKPD dan diskusi tentang program Desa Tangguh Bencana. Desa dan kelurahan tersebut dipilih karena mampu memenuhi kriteria desa tangguh. Kedua desa/kelurahan tersebut mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Masyarakat ketika terkena dampak bencana, akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri. Selanjutnya, diharapkan ke depannya agar wilayah-wilayah dapat mengikuti dan menjadi desa tangguh seperti halnya Desa Purwajaya dan Kelurahan Loa Ipuh Darat.

Semua program pada prinsipnya melaksanakan peningkatan kemampuan untuk masyarakat desa, termasuk Desa Tangguh Bencana perlu diketahui oleh seluruh masyarakat desa karena program tersebut ditujukan untuk memberi kemanfaatan kepada seluruh warga desa tanpa terkecuali, namun, selama pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana, terutama dalam prosesnya untuk menghasilkan kajian, peta rencana dan dokumen lain, hanya memerlukan melibatkan sejumlah perwakilan warga saja, perwakilan kelompok masyarakat tersebut mencakup kumpulan-kumpulan

dari perempuan, laki-laki, kelompok rentan (para difabel, penyandang cacat, anak usia lanjut, anak-anak yang bersekolah, dll).

Informasi yang dikemukakan bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar untuk mengetahui seluk beluk kondisi lingkungan desa dan penduduknya. Hasil pengumpulan data dasar yang menunjukkan kondisi kemampuan desa saat ini akan digunakan untuk menunjukkan kondisi kemampuan desa saat ini. Data dasar yang dikumpulkan digunakan untuk menunjukkan pembangunan fisik dan non-fisik apa saja yang telah dilakukan di desa, dan seberapa tingkat kemampuan masyarakat desa sebelum Program Desa Tangguh Bencana dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaannya hasil kerja yang dicapai oleh program dapat dibandingkan dengan data dasar. Perbedaan yang diidentifikasi merupakan gambaran capaian langsung dari hasil kegiatan program Desa Tangguh Bencana.

Partisipasi masyarakat dan kerja sama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam memberhasilkan Program Desa Tangguh Bencana berjalan dengan baik. Masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan

tidak dilakukan saat terjadi bencana yang diberikan melalui sosialisasi yang diberikan pemerintah. Namun sebagian masyarakat terhambat dalam mendukung dan melaksanakan desa tangguh bencana ini dikarenakan sebagian besar profesi dari penduduk adalah petani, peternak dan buruh. Sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak dapat mengikuti program Desa Tangguh Bencana dikarenakan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan masyarakat bekerja pada waktu-waktu tertentu. Hambatan lain adalah terkait anggaran dari pemerintah yang pada Tahun 2012-2016 Program Desa Tangguh bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan secara rutin. Program Desa Tangguh Bencana baru terbentuk pada tahun 2014, dan dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun 2016. Pada Tahun 2017-2018 berkenaan dengan adanya keterbatasan dana kegiatan sempat terhenti.

Pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kutai Kartanegara mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebabkan menghilangnya anggaran yang seharusnya digunakan sebagai dana dalam memfasilitasi Program Desa Tangguh Bencana yang ada di Kutai Kartanegara. Masyarakat pada desa tetap

menjalankan program Desa Tangguh Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya bertugas untuk menjadi motivator. Karena adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah pada waktu itu berubahnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi dinas pemadam kebaruan dan penanggulangan bencana, adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah itu, Badan Penanggulangan Bencana tidak lagi mendapat dana lagi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. karena sedikitnya anggaran. Sehingga program Desa Tangguh Bencana tersebut terhambat pada tahun 2017.

Pembentukan kelompok relawan pada Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya diatur dalam Surat Keputusan Lurah Loa Ipuh Darat Nomor 002 Tahun 2015 tentang Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2020 yang berjumlah 28 orang dan Surat Keputusan Kepala Desa Purwajaya Nomor 360/58/PWA/XII/2015 tentang Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Purwajaya yang berjumlah 19 Orang. Saat terjadi bencana disuatu tempat, maka masyarakatlah yang akan menerima akibat langsung, warga masyarakat menjadi korban atau penanggap pertama (*first responder*).

Masyarakat sendiri dapat melakukan segala usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pada kondisi tanggap bencana khususnya, banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang siap untuk memberikan pertolongan segera, pencarian, penyelamatan dan evakuasi membantu memenuhi kebutuhan darurat dan sebagainya. Tenaga-tenaga tersebut adalah Relawan Penanggulangan Bencana. Menjadi relawan dapat memberikan respon yang efektif dalam situasi tanggap darurat, diperlukan pengorganisasian yang baik dan berkesinambungan. Dibentuklah kelompok relawan desa/kelurahan sebagai wadah pembinaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku jiwa korsa.

Kelompok relawan akan menjadi salah satu bagian dari upaya penyatuan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat, untuk menanggulangi bencana yang dihadapi bersama. Pembentukannya dapat merupakan bentukan perorangan atau kelompok, yang sudah ada dalam masyarakat yang bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing menyumbang, agar dapat menanggulangi bencana secara efisien tepat guna dan tepat waktu. Pada pra bencana tugas utama kelompok relawan ini adalah membuat perencanaan untuk

mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya.

Kelompok dengan tugas utama diatas, perlu berupaya agar memiliki kemampuan yang diperlukan, dalam mengelola tanggap darurat dan mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan. Anggota kelompok harus dapat mengisi kemampuan yang diperlukan ini.

PENUTUP

Perlu kesadaran dan transformasi pada masyarakat untuk mengetahui pentingnya tata cara penanggulangan bencana. Desa tangguh bencana membutuhkan kontribusi para pelaksana kegiatan dengan dukungan dari pemerintah, fasilitator, maupun masyarakat dalam meningkatkan keberlangsungan dari program. Strategi mempertahankan kerjasama dan membangun hubungan kemitraan antara BPBD, fasilitator, dan masyarakat menjadi fokus utama dalam mewujudkan desa tangguh bencana. Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat yang ada pada daerah rawan bencana akan lebih baik di masa yang akan datang dan berkelanjutan (*suistainable*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Ulfah, I. F., & Afala, L. M. (2018). Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017. *Journal of Governance and Policy*, 4(2), 50-61.
- Azis Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm 33-34.
- Buchari, A., Santoso, M. B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di kabupaten garut (studi kasus di desa pasawahan kecamatan tarogong kaler). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3(1), 49-62.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). Data management and analysis methods.
- Ginandjar Kartasasmitha, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996), hlm 145.
- Maarif, S. (2011). Meningkatkan Kapasitas masyarakat dalam mengatasi risiko bencana kekeringan. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 13(2), 65-73.
- Moleong, L, J, 2006. Metodologi penelitian kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oktari, R. S. (2019). Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 4(2), 189-197.
- Zein, C. A. D., Nababan, M., Wahyudi, A. R., & Suryandari, D. (2014). *Penilaian Dampak Bencana Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jangka Pendek (Studi Kasus: Provinsi Sumatera Barat Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009)*. Working Paper Series No. 12/September.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana
- <https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/441.pdf>
- <https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/18/336/banyaknya-kejadian-dan-korban-bencana-alam-menurut-jenisnya-2015.html>

